



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	182.191.199.000,00
b. Dana perimbangan	Rp	819.451.224.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	292.322.110.640,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.293.964.533.640,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) belanja pegawai	Rp	756.267.792.650,00
2) belanja bunga	Rp	37.000.000,00
3) belanja subsidi	Rp	0,00
4) belanja hibah	Rp	46.151.753.000,00
5) belanja bantuan sosial	Rp	4.130.000.000,00
6) belanja bagi hasil	Rp	6.157.224.400,00
7) belanja bantuan keuangan	Rp	117.445.101.711,00
8) belanja tidak terduga	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	931.188.871.761,00
b. Belanja Langsung		
1) belanja pegawai	Rp	108.303.495.600,00
2) belanja barang dan jasa	Rp	267.215.874.700,00
3) belanja Modal	Rp	175.191.157.611,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	550.710.527.911,00
Jumlah Belanja	Rp	1.481.899.399.672,00
Defisit	(Rp	187.934.866.032,00)
3. Pembiayaan		
a. penerimaan	Rp	190.243.866.032,00
b. pengeluaran	Rp	2.309.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	187.934.866.032,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Desember 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI



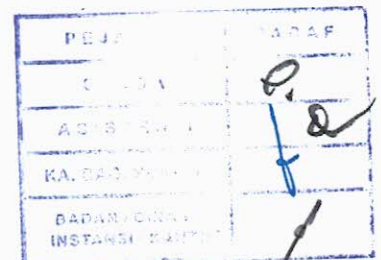
H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 39

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Desember 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 23 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

EDDY DJOKO PRASETIJO, SH

Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19590911 198203 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 39



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.293.964.533.640,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	182.191.199.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.338.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	29.090.477.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.404.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.358.722.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	819.451.224.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.733.137.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	723.091.447.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	68.626.640.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	292.322.110.640,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.492.290.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.172.513.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228.657.307.640,00
2	BELANJA	1.481.899.399.672,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	931.188.871.761,00
2.1.1	Belanja Pegawai	756.267.792.650,00
2.1.2	Belanja Bunga	37.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	46.151.753.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.130.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.157.224.400,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	117.445.101.711,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	550.710.527.911,00
2.2.1	Belanja Pegawai	108.303.495.600,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	267.215.874.700,00
2.2.3	Belanja Modal	175.191.157.611,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(187.934.866.032,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	190.243.866.032,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	190.243.866.032,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.309.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.254.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	187.934.866.032,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Pit. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI



H. ABDUL HAFIDZ
H. ABDUL HAFIDZ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15	Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur	1.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur	1.600.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(20.916.493.600,00)	

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI


H. ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS	
KELOMPOK	
KABUPATEN	
BADAN/LEMBAGA	
INSTANSI/KORPORASI	

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.293.964.533.640,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	182.191.199.000,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	36.338.000.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	250.000.000,00	
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	85.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	80.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	70.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	15.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	55.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.02.05	Katering	900.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.02.06	Warung	45.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.03	Pajak Hiburan	150.000.000,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	108.368.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	480.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	3.240.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	16.712.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.03.20	Permainan Play Station/Video Game	1.200.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.03.22	Hiburan Lainnya	20.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.04	Pajak Reklame	575.000.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	424.377.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.04.02	Reklame Kain	148.123.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	1.500.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	1.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	11.110.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	11.110.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.07	Pajak Parkir	8.000.000,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	8.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.100.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan /Keramaian	561.498.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	20.750.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011
4.1.2.03.07	Retribusi Izin Usaha Perdagangan	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011
4.1.2.03.08	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	0,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.404.000.000,00	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.404.000.000,00	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah	6.404.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2013
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.358.722.000,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	20.000.000,00	
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	20.000.000,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	Keputusan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2000
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	5.500.000.000,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	5.500.000.000,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	4.210.000,00	
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	4.000.000,00	
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	210.000,00	
4.1.4.13	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	
4.1.4.13.04	Angsuran/Cicilan Partisipasi Kios Alon-alon Lasem	0,00	
4.1.4.13.05	Angsuran/Cicilan Partisipasi Kios Pasar Lasem	0,00	
4.1.4.13.06	Angsuran/Cicilan Partisipasi Kios Ex Era	0,00	
4.1.4.13.07	Angsuran/Cicilan Pasar Desa Tahunan	0,00	
4.1.4.13.08	Angsuran/Cicilan Pasar Buah	0,00	
4.1.4.14	Penerimaan Lain-lain	172.667.000,00	
4.1.4.14.02	Sewa kios dan gudang	76.667.000,00	
4.1.4.14.05	Bunga dari BPD	96.000.000,00	
4.1.4.16	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	77.000.000.000,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan BLUD RSUD	77.000.000.000,00	
4.1.4.21	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	24.161.845.000,00	
4.1.4.21.01	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Rembang I	1.380.000.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.02	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Rembang II	1.461.296.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.4.21.03	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kaliore	1.625.988.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.04	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sumber	1.660.272.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.05	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sulang	1.776.000.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.06	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Bulu	849.648.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.07	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Gunem	636.000.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.08	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pamotan	2.558.832.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.09	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pancur	986.832.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Lasem	1.898.640.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.11	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Suke	1.245.881.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.12	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kragan I	1.284.000.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kragan II	1.349.568.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sarang	2.627.064.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.15	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sale	1.164.096.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.1.4.21.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sedan	1.657.728.000,00	Surat Edaran Mendagri RI Nomor 900/2280/SJ/2014
4.2	DANA PERIMBANGAN	819.451.224.000,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.733.137.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	23.979.862.000,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	13.200.638.000,00	
4.2.1.01.02	Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps.25, Ps.29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Ps.21	10.779.224.000,00	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.753.275.000,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.682.830.000,00	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	402.414.000,00	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi (Migas)	247.215.000,00	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	283.279.000,00	
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	13.602.000,00	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum	123.935.000,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	723.091.447.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	723.091.447.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	723.091.447.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	68.626.640.000,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	68.626.640.000,00	
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Pendidikan	26.792.590.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Kesehatan	6.241.520.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Keluarga Berencana	1.692.620.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Prasarana Jalan	9.003.150.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Prasarana Irigasi	3.312.700.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	3.277.540.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Kelautan dan Perikanan	4.401.540.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Pertanian	6.783.430.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup	1.264.300.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Kehutanan	1.359.900.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.13	Dana Alokasi Khusus Perdagangan	1.865.140.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat	432.180.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Sanitasi	2.200.030.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	292.322.110.640,00	
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.492.290.000,00	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.492.290.000,00	
4.3.1.01.01	Pemerintah	1.492.290.000,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.172.513.000,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	62.172.513.000,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.180.000.000,00	
4.3.3.01.02	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19.200.000.000,00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.356.500.000,00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Retribusi Metrologi	0,00	
4.3.3.01.06	Bagi Hasil Dari Retribusi SP III Kayu	0,00	
4.3.3.01.07	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.422.513.000,00	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2013
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	13.500.000,00	
4.3.3.01.09	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	4.000.000.000,00	
4.3.3.05	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dari Propinsi	0,00	
4.3.3.05.01	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	0,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228.657.307.640,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	228.657.307.640,00	
4.3.4.01.01	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	188.362.620.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.128.000.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
4.3.4.01.06	Dana Bantuan Desa	39.166.687.640,00	Peraturan Presiden RI Nomor 162 Tahun 2014
5	BELANJA	1.481.899.399.672,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	931.188.871.761,00	

NOMOR URUT		URAIAN		JUMLAH	DASAR HUKUM	
1		2		3	4	
5.1.1		Belanja Pegawai		756.267.792.650,00		
5.1.1.01		Gaji dan Tunjangan		503.621.772.650,00		
5.1.1.01.01		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		375.856.320.162,00		
5.1.1.01.02		Tunjangan Keluarga		35.268.912.190,00		
5.1.1.01.03		Tunjangan Jabatan		7.527.543.975,00		
5.1.1.01.04		Tunjangan Fungsional		27.906.267.250,00		
5.1.1.01.05		Tunjangan Fungsional Umum		6.618.594.235,00		
5.1.1.01.06		Tunjangan Beras		23.181.795.489,00		
5.1.1.01.07		Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus		10.992.510.927,00		
5.1.1.01.08		Pembulatan Gaji		6.422.658,00		
5.1.1.01.09		Iuran Asuransi Kesehatan		12.263.115.764,00		
5.1.1.01.10		Uang Paket		86.058.000,00		
5.1.1.01.11		Tunjangan Badan Musyawarah		27.954.000,00		
5.1.1.01.12		Tunjangan Komisi		55.907.000,00		
5.1.1.01.13		Tunjangan Badan Anggaran		29.415.000,00		
5.1.1.01.14		Tunjangan Badan Kehormatan		7.857.000,00		
5.1.1.01.16		Tunjangan Perumahan		2.729.280.000,00		
5.1.1.01.17		Uang Duka Wafat/Tewas		615.750.000,00		
5.1.1.01.18		Uang Jasa Pengabdian		13.440.000,00		
5.1.1.01.19		Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD		393.120.000,00		
5.1.1.01.20		Biaya Pengurusan Jenazah		27.075.000,00		
5.1.1.01.21		Tunjangan Badan Legislasi		14.434.000,00		
5.1.1.02		Belanja Tambahan Penghasilan PNS		245.664.520.000,00		
5.1.1.02.01		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja		11.939.400.000,00		
5.1.1.02.06		Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS		2.362.500.000,00		
5.1.1.02.07		Tunjangan Profesi Guru PNS		231.362.620.000,00		
5.1.1.03		Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH		4.002.000.000,00		
5.1.1.03.01		Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD		3.402.000.000,00		
5.1.1.03.02		Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH		600.000.000,00		
5.1.1.05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah		1.784.500.000,00		
5.1.1.05.01		Insentif Pemungutan Pajak Daerah		1.784.500.000,00		
5.1.1.06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		1.195.000.000,00		
5.1.1.06.01		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		1.195.000.000,00		
5.1.2		Belanja Bunga		37.000.000,00		
5.1.2.01		Bunga Utang Pinjaman		37.000.000,00		
5.1.2.01.03		Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank		37.000.000,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.4	Belanja Hibah	46.151.753.000,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	46.151.753.000,00	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	46.151.753.000,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.130.000.000,00	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.130.000.000,00	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	4.130.000.000,00	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.157.224.400,00	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.620.300.000,00	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.620.300.000,00	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.536.924.400,00	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.536.924.400,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	117.445.101.711,00	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	116.354.146.040,00	
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	116.354.146.040,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.090.955.671,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.090.955.671,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	550.710.527.911,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	108.303.495.600,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	41.389.994.700,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.417.905.500,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	350.200.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	395.595.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Harian/Perseorangan	17.697.508.000,00	
5.2.1.01.05	Honor Pelaksana Administrasi Kegiatan	7.355.106.200,00	
5.2.1.01.06	Honor Tim Penilai Angka Kredit	52.380.000,00	
5.2.1.01.07	Honor Kepala Kelurahan Dalam Pelunasan PBB	15.500.000,00	
5.2.1.01.09	Honorarium Tim Perencanaan Pengadaan Tanah	5.800.000,00	
5.2.1.01.11	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	100.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.480.000,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	835.232.000,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	136.892.000,00	
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	7.000.000,00	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor/LCD	15.800.000,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	23.100.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	229.040.000,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	39.900.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Musik/Sound System	316.900.000,00	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Dekorasi	60.100.000,00	
5.2.2.10.09	Belanja sewa dokumentasi	3.000.000,00	
5.2.2.10.12	Belanja sewa sketsel	3.500.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.453.602.000,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.312.232.500,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.513.765.500,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.173.240.000,00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman Pasien	995.156.000,00	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan	469.516.000,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi	1.989.692.000,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	657.847.900,00	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	60.000.000,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	162.824.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	139.553.900,00	
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian PSR	153.540.000,00	
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	141.930.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	159.920.000,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	155.720.000,00	
5.2.2.13.02	Belanja pakaian kerja kesehatan	4.200.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	776.569.000,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.900.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	145.889.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	318.305.000,00	
5.2.2.14.05	Belanja pakaian khusus lainnya	291.475.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.933.048.500,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.369.714.750,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.563.333.750,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	50.000.000,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan non PNS	3.401.406.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.235.906.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	352.200.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	711.300.000,00	
5.2.2.17.04	Belanja Jasa Perjalanan Dinas	102.000.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.606.628.000,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.191.828.000,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Taman	214.800.000,00	
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Dermaga Jetty	100.000.000,00	
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Reklamasi	100.000.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.739.615.000,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	272.500.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.650.175.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	152.015.000,00	
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Konsultansi Survei dan Pemetaan	504.925.000,00	
5.2.2.21.09	Belanja Jasa Konsultansi Swakelola dengan Instansi Lain	150.000.000,00	
5.2.2.21.10	Belanja Jasa Konsultansi Swakelola dengan Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	
5.2.2.23	Belanja Hibah Barang atau Jasa	126.480.782.600,00	
5.2.2.23.01	Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	126.480.782.600,00	
5.2.2.24	Belanja Bantuan Sosial Barang	755.070.000,00	
5.2.2.24.01	Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	755.070.000,00	
5.2.2.25	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	69.775.000,00	
5.2.2.25.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	69.775.000,00	
5.2.2.26	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat (hadiah, penghargaan)	459.242.000,00	
5.2.2.26.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	70.340.000,00	
5.2.2.26.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	388.902.000,00	
5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	345.475.000,00	
5.2.2.27.03	Belanja Jasa Kegiatan Outbond	23.275.000,00	
5.2.2.27.04	Belanja Jasa Event Organizer	276.200.000,00	
5.2.2.27.05	Belanja Jasa Pejuang	25.000.000,00	
5.2.2.27.06	Belanja Jasa Pengabdian	21.000.000,00	
5.2.2.28	Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hadiah, Penghargaan)	430.075.000,00	
5.2.2.28.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	165.150.000,00	
5.2.2.28.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	264.925.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.30	Belanja Beasiswa Pendidikan	315.000.000,00	
5.2.2.30.03	Belanja Beasiswa Pendidikan Tinggi	315.000.000,00	
5.2.2.31	Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur	2.320.855.000,00	
5.2.2.31.01	Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur	2.320.855.000,00	
5.2.2.32	Belanja Barang dan Jasa BLUD	35.030.740.000,00	
5.2.2.32.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD dr. R. Soetrasno	35.030.740.000,00	
5.2.3	Belanja Modal	175.191.157.611,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	50.000.000,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	50.000.000,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	9.841.050,00	
5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	9.841.050,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.401.000.000,00	
5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment	601.000.000,00	
5.2.3.14.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader	800.000.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	42.300.000,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	4.100.000,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	38.200.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.483.593.000,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.011.800.000,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	597.750.000,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	436.978.000,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	430.465.000,00	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.600.000,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	161.500.000,00	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	12.500.000,00	
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	149.000.000,00	
5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	100.000.000,00	
5.2.3.19.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	100.000.000,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	37.500.000,00	
5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	33.000.000,00	
5.2.3.22.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah	2.500.000,00	
5.2.3.22.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	2.000.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	317.035.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.23.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service	106.500.000,00	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	7.000.000,00	
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	203.535.000,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.027.200.000,00	
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	39.000.000,00	
5.2.3.24.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain	7.000.000,00	
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	13.000.000,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	104.350.000,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	863.850.000,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	54.800.000,00	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	12.100.000,00	
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	36.000.000,00	
5.2.3.25.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	6.700.000,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	75.900.000,00	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	15.900.000,00	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	60.000.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.967.909.400,00	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	42.548.200,00	
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	7.600.000,00	
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	17.150.000,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	726.225.200,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.174.386.000,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.517.523.950,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.055.262.050,00	
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	11.800.000,00	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	80.470.000,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	582.417.950,00	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	17.396.000,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	613.728.950,00	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	156.449.000,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.796.042.300,00	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	63.076.000,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.514.844.000,00	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	38.500.000,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	243.608.000,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	662.864.300,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	273.150.000,00	

Perbup Ia

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.309.000.000,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.254.000.000,00	
6.2.2.02.01	BUMD	2.254.000.000,00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00	
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	55.000.000,00	
6.2.3.03.01	Pembayaran Pokok Utang Loan ADB	55.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	187.934.866.032,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011

Pt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI


H. ABDUL HAFIDZ

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTENSI	
KATIB	
DAKTER/KELOMPOK	
INSTANSI	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	6.634.000,00	
5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	5.475.900.000,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	9.518.092.000,00	
5.2.3.37.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	1.143.950.000,00	
5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	66.000.000,00	
5.2.3.37.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	658.300.000,00	
5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	306.000.000,00	
5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	717.300.000,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	6.626.542.000,00	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	122.500.000,00	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemaman	72.500.000,00	
5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	50.000.000,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.144.902.000,00	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.867.950.000,00	
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	530.000.000,00	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	14.545.410.000,00	
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.165.000.000,00	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.228.750.000,00	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.702.092.000,00	
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	929.800.000,00	
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	200.000.000,00	
5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	1.376.000.000,00	
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	11.245.100.000,00	
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.354.800.000,00	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	200.000.000,00	
5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	200.000.000,00	
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	24.000.000,00	
5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	24.000.000,00	
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	1.000.000.000,00	
5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	1.000.000.000,00	
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya	1.260.978.850,00	
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	1.260.978.850,00	
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.000.000,00	
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	13.000.000,00	

